

BAB II

PERKEMBANGAN PARADIPLOMASI KOTA SURABAYA

Dalam Bab ini, penulis mengawali pembahasan terkait implementasi paradiplomasi Kota Surabaya di era kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi periode 2021-2024 dengan membahas mengenai bagaimana perkembangan paradiplomasi di kota Surabaya dengan beberapa sub bab pembahasan. Dalam Bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana wewenang Pemerintah Kota Surabaya dalam mengimplementasikan paradiplomasi, bagaimana riwayat paradiplomasi sejak kerja sama *sister city* pertama kali dilaksanakan di Surabaya hingga tahun 2024, bagaimana kerja sama internasional Pemerintah Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi, dan bagaimana citra internasional kota Surabaya di kancah internasional.

2.1 Wewenang Implementasi Paradiplomasi Kota Surabaya

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah tidak dapat dipisahkan dari kebijakan otonomi daerah melalui desentralisasi kewenangan yang sebelumnya sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Pusat yang kini memberikan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah. Tujuannya adalah agar daerah dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya secara lebih optimal. Ketentuan terkait Pemerintahan Daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.²³ Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara implisit mengakui dampak globalisasi dalam menciptakan konstelasi aktor baru di tataran hubungan internasional. Regulasi ini memberikan mandat legal kepada pemerintah daerah untuk berperan sebagai *sub-state actor* yang otonom dalam membangun jaringan kerja sama internasional. Keberadaan payung hukum tersebut sekaligus merefleksikan pergeseran paradigma dimana pemerintah daerah kini diakui sebagai entitas strategis yang turut berkontribusi dalam pembangunan regional.²⁴

Kebijakan desentralisasi memberikan posisi strategis kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan paradiplomasi, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL) sebagai landasan hukum utama. Regulasi tersebut secara rinci mengatur sebelas tahapan prosedural yang harus dilalui, mulai dari inisiasi prakarsa, penjajakan, penandatanganan LoI, penyusunan rencana kerja sama, persetujuan DPRD setempat, permintaan fasilitasi kepada pemerintah pusat, penyusunan MoU, penandatanganan MoU, implementasi kesepakatan, evaluasi pelaksanaan, hingga pelaporan akhir kegiatan. Dalam seluruh proses tersebut, pemerintah daerah diwajibkan untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri, Dewan

²³ Asmono & Prasetyo. *Op. Cit.*

²⁴ Septy Farina Ayu. 2007. *Hubungan Kerjasama Sister City Surabaya-Kochi (1997-2006)*. Skripsi. Surabaya: Jurusan Hubungan Internasional Universitas Airlangga.

Perwakilan Rakyat Daerah setempat, serta Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan yang berlaku.²⁵

Regulasi ini secara eksplisit menetapkan sejumlah persyaratan substantif yang wajib dipenuhi pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama internasional. Persyaratan tersebut mencakup beberapa aspek krusial: pertama, keberadaan hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dengan negara mitra; kedua, relevansi kerja sama dengan kewenangan dan urusan pemerintah daerah; ketiga, larangan keras terhadap pembukaan kantor perwakilan di luar negeri; keempat, larangan campur tangan dalam urusan internal negara lain; kelima, kesesuaian dengan agenda pembangunan nasional dan daerah; keenam, kesetaraan level administratif antara pihak-pihak yang bekerjasama; ketujuh, penerapan prinsip saling melengkapi; serta kedelapan, komitmen untuk memperkuat hubungan *people-to-people*. Seluruh persyaratan ini dirancang untuk memastikan kerja sama internasional daerah tetap selaras dengan kepentingan nasional sekaligus memperkuat otonomi daerah dalam koridor yang ditetapkan.²⁶

Implementasi paradiplomasi oleh Pemerintah Kota Surabaya dilaksanakan dengan berpedoman pada kerangka hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama internasional. Secara operasional, Surabaya merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

²⁵ “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 25 Tahun 2020 Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Lembaga di Luar Negeri” (N.D.)

²⁶ *Ibid.*

Nomor 25 Tahun 2020 sebagai panduan teknis dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah luar negeri maupun lembaga internasional. Dengan ketat mengikuti mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan tersebut, seluruh inisiatif kerja sama internasional yang dibangun dapat terlaksana secara sistematis dan memenuhi semua aspek legalitas yang dipersyaratkan.²⁷

Struktur kelembagaan paradiplomasi Kota Surabaya diwadahi melalui pembentukan Sub Koordinator Kerjasama di bawah Bagian Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Unit khusus ini memiliki mandat untuk mengelola seluruh aktivitas kerjasama, baik berskala nasional maupun internasional, termasuk penyelenggaraan paradiplomasi. Secara kelembagaan, Bagian Hukum dan Kerjasama berada di bawah kepemimpinan Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. sebagai Kepala Bagian, dengan Djoenedie Dodiek S, S.H. menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Kerjasama yang bertanggung jawab atas koordinasi implementasi paradiplomasi. Fungsi utama tim ini mencakup pengawasan dan sinkronisasi seluruh aspek kerjasama internasional guna memastikan efektivitas pelaksanaan serta kontribusinya terhadap pembangunan kota.²⁸

²⁷ Nabillah Rahmawati. 2024. *Efektivitas Kerja Sama Sister Cities Pemerintah Kota Surabaya Terkait Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Selama Masa Pandemi Covid-19*. Undergraduate thesis. Universitas Muhammadiyah Malang.

²⁸ Struktur Organisasi Bagian Hukum dan Kerjasama. Diakses dalam <https://hukumdankerjasama.surabaya.go.id/tentang-kami/struktur-organisasi/> (22/02/2025, 17.29 WIB)

**Gambar 1. Struktur Organisasi Bagian Hukum dan Kerjasama,
Sekretariat Daerah Kota Surabaya**



Sumber Gambar: Hukumdankerjasama.surabaya.go.id²⁹

Berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi Sekretariat Daerah, khususnya Pasal 9 dan 10, Bagian Hukum dan Kerjasama memiliki tugas pokok meliputi: penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, koordinasi formulasi kebijakan daerah, sinkronisasi pelaksanaan tugas antar Perangkat Daerah, serta monitoring dan evaluasi di bidang legislasi daerah, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum. Selain itu, bagian ini juga bertanggung jawab dalam memfasilitasi kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri, melakukan evaluasi terhadap implementasi kerjasama, serta

²⁹ *Ibid.*

menyelesaikan tugas tambahan yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan kewenangannya.³⁰

Sub Koordinator Kerjasama bertugas menyiapkan rencana program kerja dan petunjuk teknis, sekaligus melakukan koordinasi dengan lembaga terkait. Selain itu, tim ini juga merumuskan kebijakan kerja sama daerah, mengelola data kerja sama dalam dan luar negeri, serta mengawasi pelaksanaannya. Tugas lainnya mencakup penyusunan laporan hasil kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan evaluasi. Sub Koordinator juga menyiapkan bahan perencanaan strategis seperti rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan rencana kerja anggaran. Di sisi administrasi, tim ini bertanggung jawab mengelola administrasi umum, mengawasi kinerja, menyiapkan data pelaporan indikator kinerja, serta melaksanakan tugas tambahan yang diberikan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.³¹

Wewenang yang menjadi landasan implementasi paradiplomasi di Kota Surabaya bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020. Kedua regulasi ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah, termasuk Kota Surabaya, untuk menjalin kerja sama internasional dalam rangka memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Atas dasar tersebut, Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah

³⁰ Tugas dan Fungsi Bagian Hukum dan Kerjasama. Diakses dalam <https://hukumdankerjasama.surabaya.go.id/tentang-kami/tugas-dan-fungsi/> (22/02/2025, 17.31 WIB)

³¹ *Ibid.*

Kota Surabaya, di bawah arahan wali kota, bertugas mengoordinasikan dan melaksanakan berbagai aktivitas paradiplomasi. Maka dari itu, pada sub bab berikut ini akan membahas tentang bagaimana riwayat paradiplomasi kota Surabaya yang telah terjalin hingga tahun 2024.

2.2 Riwayat Paradiplomasi Kota Surabaya

Praktik paradiplomasi Surabaya diawali dengan pembentukan kerja sama kota kembar (*sister city*) pertama pada tahun 1991 melalui inisiatif Wali Kota Surabaya saat itu, H. Poernomo Kasidi, dengan Pemerintah Kota Seattle, Amerika Serikat. MoU resmi ditandatangani pada 27 September 1992 antara Wali Kota Surabaya dengan Wali Kota Seattle Norman B. Rice. Ruang lingkup kolaborasi ini meliputi tujuh bidang utama: (1) tata kelola perkotaan, (2) manajemen pelabuhan, (3) konservasi lingkungan, (4) pertukaran pendidikan, (5) pengembangan seni dan budaya, (6) ilmu pengetahuan dan teknologi, serta (7) pengembangan sektor usaha. Sebagai wadah implementasi, dibentuklah *Seattle-Surabaya Sister City Association* (SSSCA) untuk memfasilitasi berbagai program kolaborasi antar kedua kota.³² SSSCA didirikan untuk memperkuat hubungan strategis antara Surabaya dan Seattle melalui berbagai inisiatif lintas sektor, khususnya dalam bidang pertukaran budaya, pendidikan, transfer teknologi, dan pengembangan bisnis. Asosiasi ini berfungsi sebagai *platform* kolaborasi yang memfasilitasi interaksi kedua kota, mempromosikan pertukaran pengetahuan, serta meningkatkan pemahaman budaya dan kepentingan bersama. Sebagai bentuk implementasi awal,

³² Salma. *Op. Cit.*

SSSCA meluncurkan program pertukaran pendidikan yang melibatkan akademisi dari University of Washington dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Kolaborasi ini difokuskan pada berbagi materi perkuliahan dan riset di bidang fisika nuklir, menjadi fondasi bagi kerja sama akademik jangka panjang antara kedua institusi.³³

Kerja sama *sister city* Surabaya berlanjut dengan penandatanganan MoU *sister city* dengan Busan, Korea Selatan, pada 10 November 1994 yang mencakup pengembangan pelabuhan, ekonomi, pengembangan transportasi dan pariwisata, serta pendidikan dan budaya. Selanjutnya penandatanganan MoU *sister city* dengan Kochi, Jepang, pada tahun 1997 yang mencakup ekonomi, industri, serta pengembangan pariwisata dan pendidikan. Kemudian penandatanganan MoU *sister city* dengan Monterrey, Meksiko, pada tahun 2001 yang berfokus pada promosi investasi, perdagangan, industri, pariwisata, dan kebudayaan. Penandatanganan MoU *sister city* dengan Guangzhou, Tiongkok, pada tahun 2005 yang mencakup bidang tata kelola perkotaan, promosi usaha dan industri, serta penguatan sektor perdagangan, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, dan olahraga. Penandatanganan MoU *sister city* dengan Xiamen, Tiongkok, pada tahun 2006 yang mencakup ekonomi, IPTEK, pendidikan, olahraga, kebudayaan, dan kesehatan. Penandatanganan MoU *sister city* dengan Varna, Bulgaria, pada tahun 2010 yang mencakup bidang ekonomi, industri, pendidikan, IPTEK, transportasi, dan kesehatan, dan diperpanjang pada tahun 2016 dengan bidang kerja sama yang sama. Penandatanganan MoU *sister city* dengan Kitakyushu, Jepang, pada tahun 2012

³³ Rahmawati. *Op. Cit.*

yang berfokus pada pengembangan masyarakat rendah karbon, daur ulang sumber daya, dan peningkatan kapasitas pejabat kota. MoU ini diperpanjang pada tahun 2016 dengan bidang kerja sama yang sama, lalu kembali diperpanjang pada tahun 2020 dengan tambahan kerja sama dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Penandatanganan MoU *sister city* dengan Liverpool, Inggris, pada 19 Maret 2018 yang mencakup bidang pengembangan ekonomi kreatif, manajemen pelabuhan, pengembangan kota, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dan penandatanganan MoU *sister city* dengan Gaziantep, Turki, pada tahun 2021 yang mencakup bidang promosi budaya dan pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.³⁴

Tabel 2.1 Mitra *Sister City* kota Surabaya yang ditandatangani MoU tahun 1992-2021

No.	Nama Kota	Penandatanganan MoU	Bidang Kerja Sama
1.	Seattle, Amerika Serikat	1992	a. Manajemen Perkotaan; b. Manajemen Pelabuhan; c. Pelindungan LH; d. Pendidikan; e. Kesenian dan Kebudayaan; f. IPTEK; g. Pengembangan Dunia dan Usaha.
2.	Busan, Korea Selatan	1994	a. Pengembangan Pelabuhan; b. Perdagangan dan Pengembangan Ekonomi; c. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; d. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Kota; e. Transportasi dan Pariwisata; f. Peningkatan SDM, IPTEK.

³⁴ Mitra Kerja Sama Luar Negeri. *Op. Cit.*

3.	Kochi, Jepang	1997	a. Ekonomi dan Perdagangan; b. Industri; c. Pariwisata; d. Pendidikan.
4.	Monterrey, Meksiko	2001	a. Promosi Perdagangan; b. Promosi Investasi; c. Promosi Industri; d. Promosi Pariwisata; e. Promosi Kebudayaan.
5.	Guangzhou, Tiongkok	2005	a. Pertukaran Tata Cara Manajemen Perkotaan; b. Promosi Usaha; c. Promosi Industri; d. Perdagangan dan Pariwisata; e. Kebudayaan, Kesenian, dan Pendidikan; f. Pemuda dan Olahraga.
6.	Xiamen, Tiongkok	2006	a. Ekonomi; b. Perdagangan; c. IPTEK; d. Pendidikan, Olahraga, dan Kebudayaan; e. Kesehatan.
7.	Varna, Bulgaria	2010, 2016	a. Ekonomi, Industri, dan Perdagangan; b. Pendidikan dan IPTEK; c. Transportasi; d. Kesehatan.
8.	Kitakyushu, Jepang	2012, 2016, 2020	a. Pembangunan Lingkungan Rendah Karbon; b. Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan; c. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia. D. Peningkatan Kapasitas Pejabat Kota.
9.	Liverpool, Inggris	2018	a. Pengembangan Ekonomi Kreatif; b. Manajemen Pelabuhan; c. Pengembangan Kota; dan d. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
10.	Gaziantep, Turki	2021	a. Promosi Budaya dan Pariwisata; b. Pengembangan Ekonomi

			Kreatif; c. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
--	--	--	---

Sumber: Situs resmi Bagian Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Daerah Kota Surabaya

Selain mitra *sister city* yang diresmikan dalam MoU, terdapat pula mitra *sister city* yang hanya disetujui dalam LoI yang artinya kerja sama tersebut belum ada kelanjutan untuk diresmikan ke MoU. Yakni di antaranya adalah Kota Izmir, Turki, pada 1 September 1995 dengan bidang kerja sama mencakup bidang ekonomi, industri, pendidikan, budaya, pariwisata, serta sains dan teknologi. Penandatanganan LoI dengan Marseille, Prancis, pada tahun 2007 yang mencakup kebudayaan dan pariwisata, perdagangan dan industri, serta IPTEK. Penandatanganan LoI dengan Shah Alam, Malaysia, pada tahun 2009 yang mencakup bidang perencanaan kota, kebudayaan dan pariwisata, serta kepemudaan dan olahraga. Dan penandatanganan LoI dengan Jiangmen, Tiongkok, pada tahun 2012 yang mencakup bidang ekonomi dan perdagangan, kebudayaan dan pariwisata, serta pendidikan.³⁵ Alasan mengapa LoI tersebut belum dilanjutkan ke tahap peresmian MoU memiliki beberapa alasan di antaranya adalah tidak terdapat kegiatan kerja sama lebih lanjut, hambatan akibat adanya pembatasan kewenangan Pemerintah Daerah, hingga belum adanya revitalisasi terbaru.³⁶

Selain mitra kerja sama *sister city*, Surabaya juga memiliki mitra kerja sama dengan lembaga-lembaga di luar negeri di mana kota Surabaya menjadi anggota dalam lembaga tersebut. Lembaga-lembaga tersebut yakni:

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Wawancara penulis dengan Ibu Sasha Syaifani, S.Hub.Int. Staff Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Pada 18 Juni 2024.

1. *United Cities and Local Government Asia Pacific (UCLG ASPAC)*

UCLG ASPAC merupakan organisasi regional yang menghubungkan pemerintah kota dan daerah di kawasan Asia-Pasifik. Fokus utamanya meliputi: memfasilitasi pertukaran pengetahuan antar anggota, mendorong implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tingkat lokal, dan menjadi wadah advokasi kebijakan untuk pemerintah daerah. Organisasi ini aktif menyelenggarakan forum diskusi, pelatihan teknis, dan program pembangunan berkelanjutan. Secara historis, Surabaya pernah menjadi tuan rumah kongres UCLG ASPAC ke-7 yang diadakan pada tanggal 11-15 September 2018 di gedung Dyandra Convention Hall, Surabaya. Menurut Wali Kota Risma, kongres ini diharapkan menjadi forum untuk saling belajar dan berbagi pengalaman satu daerah dengan daerah lainnya, terutama dalam mengatasi masalah perkotaan.³⁷

³⁷ *Kongres UCLG ASPAC ke-7 Resmi Dibuka di Surabaya*. Diakses pada <https://dispendik.surabaya.go.id/kongres-uclg-aspac-ke-7-resmi-dibuka-di-surabaya/#:~:text=%E2%80%9CSetelah%207th%20UCLG%20ASPAC%20Congress,di%20Surabaya%2C%E2%80%9D%20kata%20dia> (30/04/2025, 09.41 WIB)

Gambar 2. Kongres UCLG ASPAC ke-7 di Surabaya 12 September 2018



Sumber: Dispendik Surabaya³⁸

2. Tourism Promotion Organization for Global Cities (TPO)

TPO merupakan sebuah forum internasional yang berdiri tahun 2002 melalui mandat dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kota Asia-Pasifik ke-5. Organisasi ini didirikan sebagai jejaring kolaboratif antar kota untuk mendorong pertumbuhan dan pertukaran pengetahuan dalam industri pariwisata di kawasan Asia-Pasifik. Pada awal pembentukannya, TPO beranggotakan 25 kota yang tersebar di 13 negara berbeda. Perkembangan terakhir menunjukkan ekspansi signifikan dengan jumlah anggota mencapai 131 pemerintah kota dan 57 entitas non-pemerintah, mencakup asosiasi pariwisata, institusi akademik, serta pelaku usaha swasta. Keikutsertaan Pemerintah Kota Surabaya dalam TPO menjadi salah satu pilar strategis pengembangan pariwisata lokal. Data menunjukkan bahwa melalui partisipasi aktif dalam berbagai program TPO, Surabaya berhasil mencatat peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 15% selama periode 2021-

³⁸ *ibid.*

2023. Selain itu, keterlibatan ini juga memperluas jaringan kemitraan dengan berbagai *stakeholder* kunci di sektor pariwisata regional.³⁹

3. CityNet

CityNet merupakan organisasi jejaring pemangku kepentingan perkotaan terbesar di kawasan Asia Pasifik yang berfokus pada isu pembangunan berkelanjutan. Didirikan pada tahun 1987 melalui dukungan tiga badan PBB yaitu UNESCAP, UNDP, dan UN-Habitat, asosiasi ini kini mencakup lebih dari 160 anggota dari berbagai sektor, termasuk pemerintah kota, NGO, sektor swasta, serta institusi penelitian. Kota Surabaya secara resmi menjadi bagian dari *CityNet* sejak tahun 2007, memanfaatkan platform ini untuk memperkuat kapasitas pembangunan perkotaan berkelanjutan.⁴⁰

4. *Strong Cities Network* (SCN)

SCN adalah jaringan kota global independen yang berkomitmen untuk mengatasi segala bentuk kebencian, ekstremisme, dan polarisasi di tingkat lokal. SCN bekerja sama dengan seluruh otoritas sub-nasional, mulai dari ibu kota hingga kota kecil pedesaan, munisipal, provinsi, kabupaten, dan pemerintah daerah lainnya. Istilah 'kota' digunakan secara luas untuk merujuk pada semua variasi otoritas sub-nasional ini. Secara historis, pada 11-13 Maret 2020 Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berpartisipasi sebagai pembicara dalam seminar daring yang diselenggarakan oleh *The International Institute for Justice and the Rule of*

³⁹ *The Inception of TPO*. Diakses pada <https://aptpo.org/eng/?folder=introduce&page=about> (30/04/2025, 10.02 WIB)

⁴⁰ *Who We Are*. Diakses pada <https://citynet-ap.org/20-2/who-we-are/> (30/04/2025, 10.06 WIB)

Law (III). Acara bertema "Peran Pemimpin Lokal dalam Merespons Ancaman Terorisme" ini menghadirkan berbagai praktisi dan pakar keamanan global untuk mendiskusikan strategi penanganan terorisme di tingkat pemerintahan lokal.⁴¹

5. *Japan Council of Local Authorities for International Relations (J.CLAIR)*

J.CLAIR merupakan organisasi pemerintah daerah Jepang yang berfokus pada internasionalisasi pemerintah lokal melalui berbagai program kolaborasi. Fokus kegiatannya meliputi: (1) program pelatihan dan pertukaran tenaga ahli antar pemerintah daerah Jepang-Indonesia, (2) pengembangan kapasitas aparatur sipil Indonesia baik di Jepang maupun di Indonesia, serta (3) inisiatif kerjasama lain yang relevan. Sebagai contoh implementasi, pada 4-6 Desember 2018 J.CLAIR berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya menyelenggarakan pelatihan manajemen limbah medis di fasilitas kesehatan. Kegiatan ini merepresentasikan salah satu bentuk nyata kerjasama teknis antara pemerintah daerah kedua negara.⁴²

⁴¹ Jadi Pembicara di Forum Internasional, Wali Kota Risma Ungkap Strategi Penanganan Terorisme di Surabaya. Diakses pada <https://www.surabaya.go.id/id/berita/56387/jadi-pembicara-di-forum-internasional-wali-kota-risma-ungkap-strategi-penanganan-terorisme-di-surabaya> (30/04/2025, 10.23 WIB)

⁴² *Fasilitasi Pelatihan Manajemen Limbah pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh J.CLAIR*. Diakses pada <https://hukumdankerjasama.surabaya.go.id/2018/12/pelatihan-manajemen-limbah-pada-fasilitas-pelayanan-kesehatan-oleh-japan-council-of-local-authorities-for-international-activities-j-clair-singapura/> (30/04/2025, 10.32 WIB)

Gambar 3. Kunjungan Perwakilan J.CLAIR Puskesmas Tenggilis dan kunjungan ke Rumah Sakit Soewandhie pada 3 Desember 2018



Sumber: Hukumdankerjasama.surabaya.go.id⁴³

Riwayat paradiplomasi Kota Surabaya yang telah berjalan tidak lepas dari peran dan pengaruh sosok pemegang otoritas tertinggi di kota tersebut, yakni wali kota. Sebagai pemimpin, wali kota memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengarahkan kebijakan kerja sama internasional yang bertujuan untuk memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Lantas, pada sub bab berikut, akan dibahas secara khusus bagaimana Wali Kota Eri Cahyadi pada periode 2021-2024 mengimplementasikan paradiplomasi Kota Surabaya selama masa kepemimpinannya.

⁴³ *Ibid.*

2.3 Kerja Sama Internasional Kota Surabaya di Masa Kepemimpinan Eri

Cahyadi

Eri Cahyadi terpilih menjadi Wali Kota Surabaya untuk periode pertama pada tanggal 9 Desember 2020, yang kemudian dilantik secara resmi untuk menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada tanggal 26 Februari 2021. Sejak pelantikannya tersebut, Eri Cahyadi secara penuh memegang otoritas tertinggi dalam struktur Pemerintah Kota Surabaya, termasuk segala wewenang yang berkaitan dengan paradiplomasi. Paradiplomasi sendiri merupakan salah satu aspek besar dan strategis dalam kebijakan Pemerintah Kota Surabaya, di mana Eri Cahyadi memiliki peran penting dalam menginisiasi dan mengelola kerja sama internasional yang bertujuan untuk memajukan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Surabaya. Dengan visi dan misi yang jelas, Eri Cahyadi menunjukkan komitmen kuatnya untuk membawa Surabaya menjadi kota yang lebih maju, inovatif, dan memiliki daya saing global yang tinggi.⁴⁴

Selama masa kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi, Kota Surabaya hanya mencatat satu kerja sama *sister city* baru, yakni dengan Kota Gaziantep, Turki. Meskipun demikian, proses inisiasi kerja sama tersebut telah dimulai sebelum Eri Cahyadi menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. LoI yang menjadi dasar kerja sama ini telah ditandatangani pada tanggal 11 Desember 2019, sementara MoU baru ditandatangani pada tanggal 27 April 2021. Dengan demikian, meskipun inisiasi kerja sama *sister city* ini terjadi pada masa kepemimpinan sebelumnya, pengesahan

⁴⁴ Eri Cahyadi-Armuji Resmi Jadi Walikota dan Wakil Walikota Surabaya. Diakses dalam <https://lenteratoday.com/eri-cahyadi-armuji-resmi-jadi-walikota-dan-wakil-walikota-surabaya/> (22/02/2025, 17.51 WIB)

dan peresmiannya melalui MoU dilakukan pada masa kepemimpinan Eri Cahyadi. Hal ini menunjukkan bahwa Wali Kota Eri Cahyadi turut berperan dalam melanjutkan dan meresmikan kerja sama yang telah dirintis sebelumnya.⁴⁵

Kota Surabaya hingga tahun 2024 secara aktif mempertahankan hubungan *sister city* dengan tujuh mitra internasional: Busan (Korea Selatan), Kochi dan Kitakyushu (Jepang), Guangzhou serta Xiamen (Tiongkok), Liverpool (Inggris), dan Gaziantep (Turki). Keberlanjutan kemitraan ini dibuktikan melalui pembaruan MoU antara Surabaya dengan seluruh kota mitra, yang didasarkan pada dua pertimbangan utama: (1) adanya peluang pengembangan kerja sama yang belum tereksplorasi secara optimal, dan (2) komitmen untuk memelihara relasi strategis yang telah terbangun. Pembaruan kesepakatan ini merefleksikan keseriusan kedua belah pihak dalam memperdalam kolaborasi multidimensi mencakup sektor ekonomi, pendidikan, pertukaran budaya, dan transfer teknologi, dengan tujuan akhir untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di masing-masing wilayah.⁴⁶

Agenda kerja sama *sister city* Surabaya dengan ketujuh kota mitra luar negeri tersebut selama tahun 2021-2024 antara lain:

2.3.1 Busan (Korea Selatan)

⁴⁵ Wawancara penulis dengan Ibu Luluk Erika, S.Sos., Staff Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Pada 19 Juni 2024.

⁴⁶ Wawancara penulis dengan Ibu Sasha Syaifani, S.Hub.Int., Staff Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Pada 18 Juni 2024.

Dengan Busan, kerja sama difokuskan pada bidang pelabuhan, perdagangan, pendidikan, kebudayaan, dan pengelolaan kota sesuai dengan isi MoU. Namun tidak terdapat agenda besar baru pada periode ini.⁴⁷

2.3.2 Kochi (Jepang)

Dengan Kochi, kerja sama lebih aktif melalui penyelenggaraan *Festival Remo & Yosakoi* pada tahun 2023 yang diadakan di Taman Surya, Surabaya, pada malam Minggu, 16 Juli 2023. Agenda ini sekaligus perayaan 25 tahun *sister city* yang mempererat hubungan budaya antara kedua kota.⁴⁸

2.3.3 Guangzhou dan Xiamen (Tiongkok)

Dengan Guangzhou dan Xiamen, kerja sama aktif lebih banyak dilakukan dalam bentuk partisipasi forum dan pertemuan *virtual* mengingat situasi global yang masih terpengaruh pandemi selama periode tersebut. Salah satu agenda kerja sama ini adalah menyambut dengan hangat kedatangan Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Surabaya Mr. Xu Yong beserta rombongannya pada 10 April 2023 untuk mendiskusikan tentang tindaklanjut *sister city* antara Surabaya dengan Guangzhou dan Xiamen, termasuk Wali Kota Eri Cahyadi mengajak Konjen RRT melihat dan menyempurnakan Wisata Kya-kya Surabaya.⁴⁹ Selain itu pada 2022, delegasi Surabaya sempat berpartisipasi dalam forum kerja sama

⁴⁷ Wawancara penulis dengan Ibu Luluk Erika, S.Sos., Staff Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Pada 19 Juni 2024.

⁴⁸ Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Kochi mempererat kerja sama *sister city* dalam budaya dan ekonomi. Diakses dalam <https://www.surabayainsider.com/surabaya-raya/9049499090/pemerintah-kota-surabaya-dan-pemerintah-kota-kochi-mempererat-kerja-sama-sister-city-dalam-budaya-dan-ekonomi> (28/04/2025, 20.32 WIB)

⁴⁹ Perkuat *Sister City*, Wali Kota Eri Ajak Konjen RRT Sempurnakan Wisata Kya-kya. Diakses pada <https://www.surabaya.go.id/id/berita/73508/perkuat-sister-city-wali-kota-eri-ajak-konjen-rrt-sempurnakan-wisata-kya-kya> (28/04/2025, 20.59 WIB)

internasional yang dihadiri kota-kota dari Tiongkok, termasuk Xiamen, untuk mempererat hubungan dalam bidang ekonomi kreatif dan pendidikan tinggi.⁵⁰

2.3.4 Kitakyushu (Jepang)

Dengan Kitakyushu, kerja sama tetap difokuskan pada bidang lingkungan hidup, khususnya program pengembangan kota rendah karbon dan daur ulang sumber daya. Surabaya aktif menjalankan berbagai agenda kerja sama dengan Kitakyushu terkait pengelolaan sampah Kota Surabaya dengan nama agenda *Surabaya Green City* yang telah dimulai sejak penandatanganan MoU pada tahun 2012, dan masih berjalan hingga tahun 2024.⁵¹

2.3.5 Liverpool (Inggris)

Dengan Liverpool, kerja sama ini berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, khususnya pada bidang pendidikan dan sepak bola. Pemerintah Kota Surabaya aktif mengirimkan delegasi siswa sekolah dan pemain sepak bola muda Surabaya ke Liverpool, dan kunjungan pihak Liverpool terkait pelatihan tenaga pendidik dan pelatih sepak bola ke Surabaya.⁵²

2.3.6 Gaziantep (Turki)

Dengan Gaziantep, kerja sama ini aktif di bidang promosi budaya, pengembangan ekonomi kreatif, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

⁵⁰ Rahmawati. *Op. Cit*

⁵¹ Jessica Puspa Indah. 2022. *Kerjasama Sister City Surabaya Kitakyushu dalam Mewujudkan Surabaya Green City melalui Pengembangan Ecowisata Hutan Mangrove*. Universitas Kristen Satya Wacana.

⁵² Putri Handayani & Muhammad Zahidi. 2024. *Implementasi Smart City Surabaya-Liverpool Tahun 2018-2023*. Jurnal Sosial Politik. Universitas Muhammadiyah Malang

Kegiatan pertukaran budaya secara daring dan luring tentang pengembangan UMKM menjadi bagian penting dari program kerja sama selama 2021–2024, seperti yang diadakan di Surabaya *Great Expo* pada tahun 2022.⁵³ Selain itu, sebagai realisasi kerja sama *sister city* di bidang kebudayaan, pariwisata, dan pengembangan SDM, Pemerintah Kota Surabaya bersama Pemerintah Kota Gaziantep menyelenggarakan program Kelas Budaya dan Bahasa Turki. Program yang dilaksanakan secara virtual setiap Jumat sejak 4 April 2023 ini berlangsung dalam 12 pertemuan. Dari sekitar 30 peserta yang mengikuti kegiatan, sebanyak 12 orang berhasil menyelesaikan seluruh sesi dan berhak memperoleh sertifikat atas keikutsertaan mereka secara penuh.

Selama tahun 2024, Kota Surabaya menerima tawaran untuk menjalin hubungan *sister city* dari tiga kota, yakni Zhuhai (Tiongkok), Qingdao (Tiongkok), dan Piraeus (Yunani). Ketiga kota ini tertarik bekerja sama dengan Surabaya karena melihat adanya berbagai kesamaan dan potensi kerja sama yang saling menguntungkan. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Piraeus menyoroti kesamaan antara Surabaya dan Piraeus di bidang kelautan, di mana kedua kota memiliki pelabuhan besar yang memegang peran penting dalam perekonomian masing-masing. Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya dan Pelabuhan Piraeus di Yunani dianggap sebagai aset strategis yang dapat menjadi dasar kerja sama di bidang logistik, perdagangan, dan pengembangan infrastruktur maritim. Kesamaan ini

⁵³ Antaranews. *Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi usai membuka 'Surabaya Great Expo 2022' di Grand City Surabaya, Rabu (24/8/2022)*. Diakses dalam <https://jatim.antaranews.com/berita/631549/eri-cahyadi-optimistis-produk-umkm-surabaya-tembus-pasar-internasional?&m=false> (28/04/2025, 21.31S WIB)

dinilai sebagai potensi kerja sama yang menjanjikan, sehingga menjadikan Surabaya sebagai mitra yang menarik bagi ketiga kota tersebut.⁵⁴

Berbagai tawaran kerja sama yang diterima oleh Kota Surabaya harus melalui proses pengkajian mendalam oleh Pemerintah Kota Surabaya. Kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menekankan pentingnya kerja sama yang optimal dan efektif, mengingat setiap agenda kerja sama memerlukan alokasi anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, efektivitas dan manfaat dari setiap anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan kerja sama harus dikaji secara cermat. Pemerintah Kota Surabaya lebih memprioritaskan kualitas daripada kuantitas dalam menjalin hubungan *sister city*. Artinya, tidak perlu memiliki banyak mitra *sister city*, asalkan setiap kerja sama yang sudah terjalin dapat dijalankan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan Kota Surabaya. Selama periode 2021-2024, Pemerintah Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi hanya melanjutkan MoU kerja sama yang telah berjalan sejak periode-periode sebelumnya. Hal ini dianggap lebih efisien dari segi biaya yang dikeluarkan, dan mampu mempertahankan hubungan baik dengan mitra-mitra *sister city* yang telah berjalan.⁵⁵

Di samping itu, prioritas kerja Wali Kota Eri Cahyadi adalah menjalin kerja sama dengan program yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, seperti contohnya adopsi teknologi pengolahan sampah bersama

⁵⁴ Wawancara penulis dengan Ibu Sasha Syaifani, S.Hub.Int., Staff Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Pada 18 Juni 2024.

⁵⁵ Wawancara penulis dengan Bapak Djoenedie Dodiak S. S.H., Ketua Tim Kerja Kerjasama, Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Pada 19 Juni 2024.

dengan Kitakyushu, Jepang. Melalui program ini, masyarakat Surabaya merasakan dampak langsung dari paradiplomasi karena masyarakat menjadi mampu mengatasi permasalahan sampah di daerahnya. Hal ini sejalan dengan visi Wali Kota Eri Cahyadi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga Surabaya melalui program-program yang bersifat konkret dan berdampak besar bagi masyarakat.⁵⁶

Sementara itu, manfaat dari paradiplomasi secara garis besar tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat karena program-program dalam kerja sama internasional bersifat jangka panjang. Proses paradiplomasi membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menunjukkan hasil yang signifikan, seperti peningkatan investasi, pertukaran budaya, pengembangan infrastruktur kota, atau pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, meskipun paradiplomasi tetap menjadi bagian dari strategi pembangunan Kota Surabaya, Eri Cahyadi lebih memfokuskan sumber daya dan upaya pada program-program yang memberikan dampak nyata dan cepat bagi masyarakat, seperti kerja sama dalam negeri.⁵⁷

Selama periode 2021-2024, Kota Surabaya menerima sejumlah investasi melalui Penanaman Modal Asing (PMA) yang bersumber dari berbagai pihak luar negeri yang menjalankan beberapa proyek di Kota Surabaya. Data mengenai realisasi PMA tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

Tabel 2.2 Data Penanaman Modal Asing Kota Surabaya

No.	Tahun	Jumlah Proyek	Jumlah Investasi
1.	2021	312	Rp3.501.581.627.943
2.	2022	340	Rp2.538.962.173.433
3.	2023	677	Rp2.967.781.840.000
4.	2024 (Hingga Triwulan III)	870	Rp1.896.089.500.000

Sumber: DPM-PTSP Surabaya⁵⁸

Data PMA yang disajikan merupakan catatan resmi mengenai investasi asing yang masuk dan terealisasi di Kota Surabaya. Investasi ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan investor luar negeri terhadap iklim investasi di Surabaya, tetapi juga menjadi bagian dari implementasi paradiplomasi kota. Melalui kerja sama internasional dan hubungan *sister city* yang dijalin dengan berbagai kota di dunia, Surabaya berhasil menarik investasi asing sebagai wujud konkret dari diplomasi daerah. Pendekatan paradiplomasi ini memungkinkan pemerintah kota untuk membangun jejaring global yang mendorong pertukaran kepentingan di bidang ekonomi, di mana salah satu hasil nyatanya adalah masuknya modal asing yang turut mendorong pertumbuhan sektor industri dan jasa lokal. Dengan demikian, PMA bukan sekadar hasil dari mekanisme pasar bebas, tetapi juga merupakan buah dari dampak hubungan luar negeri tingkat kota yang dirancang untuk memperkuat daya saing Surabaya di kancah internasional.

⁵⁸ Realisasi Investasi Kota Surabaya. Diakses dalam <https://dpm-ptsp.surabaya.go.id/data-investasi/page/> (21/04/2025. 21.42 WIB)

2.4 Dampak Paradiplomasi Terhadap Pembangunan Kota Surabaya

Paradiplomasi Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi telah melaksanakan berbagai program kerja sama yang dilaksanakan bersama mitra luar negerinya. Melalui kolaborasi dengan kota-kota *sister city* dan lembaga luar negeri, Pemerintah Kota Surabaya mengimplementasikan sejumlah inisiatif yang mencakup bidang ekonomi dan lingkungan. Program-program ini dirancang untuk mendukung pembangunan kota, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat posisi Surabaya sebagai kota global yang berdaya saing. Dengan memanfaatkan jaringan kerja sama internasional, Surabaya diharapkan mampu menarik investasi dan mengembangkan potensi lokal, serta membuka peluang bagi pertukaran pengetahuan, budaya, dan teknologi yang bermanfaat bagi kemajuan kota.

2.4.1 Dampak Paradiplomasi Dalam Bidang Ekonomi

Di bidang ekonomi, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Surabaya. Pandemi ini menyebabkan penurunan signifikan dalam laju penjualan produk UMKM, sehingga banyak pelaku usaha mengalami keterpurukan. Tercatat pada tahun 2021, jumlah UMKM yang ada di kota Surabaya adalah 60.007 UMKM yang telah terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Surabaya dan yang

terdaftar di kecamatan yang ada di wilayah Surabaya⁵⁹. UMKM di Surabaya menghadapi berbagai tantangan, seperti penurunan omset, kesulitan dalam pemasaran, keterbatasan modal, dan kesulitan memperoleh bahan baku. Kondisi ini mengakibatkan penyusutan yang cukup besar pada sektor UMKM, padahal sektor ini merupakan penyumbang utama perekonomian Kota Surabaya, dengan kontribusi mencapai sekitar 90%.⁶⁰ Berbagai jenis UMKM, mulai dari pedagang kelontong, pengrajin, hingga usaha kuliner, merasakan dampak yang sama. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Surabaya bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) melakukan berbagai upaya agar UMKM lokal dapat bertahan dan kembali bangkit di tengah tantangan yang dihadapi selama pandemi.⁶¹

Dalam upaya membangkitkan perekonomian UMKM Kota Surabaya di tengah pandemi, Pemerintah Kota Surabaya bersama Dinkopdag berinisiatif untuk mengembangkan UMKM lokal ke tingkat internasional. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah memanfaatkan jaringan kerja sama *sister city* yang dimiliki oleh Surabaya. Dinkopdag memiliki peran penting dalam upaya ini, yaitu dengan melakukan pemberdayaan UMKM melalui pembinaan dan fasilitasi bagi pelaku usaha yang produknya akan dipromosikan dan dikirimkan ke mitra *sister city*. Program ini bertujuan untuk membuka akses pasar internasional bagi UMKM Surabaya, sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di kancah global.

⁵⁹ Rahmawati. *Op. Cit.*

⁶⁰ Abdul Hakim, Akses Pemasaran Dan Permodalan Jadi Kendala UMKM Di Kota Surabaya, [jatim.antaranews.com](https://jatim.antaranews.com/berita/555013/aksespemasaran-dan-permodalan-jadi-kendala-umkm-di-kota-surabaya), diakses dalam <https://jatim.antaranews.com/berita/555013/aksespemasaran-dan-permodalan-jadi-kendala-umkm-di-kota-surabaya> (24/02/2025, 19.31 WIB)

⁶¹ Rahmawati. *Op. Cit.*

Dengan memanfaatkan hubungan *sister city*, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mempromosikan produk UMKM unggulan ke kancah internasional dengan memanfaatkan jaringan *sister city*.⁶²

Beberapa produk UMKM lokal dikirimkan ke sejumlah mitra *sister city*, seperti Kitakyushu, Seattle, Gaziantep, dan Liverpool sebagai bagian dari strategi promosi dan ekspansi pasar yang ditampilkan pada pameran-pameran dan festival budaya di masing-masing kota. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga menggandeng mitra *sister city* Xiamen untuk menyelenggarakan pelatihan bisnis digital bagi OPD terkait. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran dan pengembangan usaha. Melalui langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kota Surabaya berharap dapat membuka peluang pasar internasional bagi UMKM lokal, sekaligus memberikan manfaat signifikan bagi pertumbuhan dan daya saing UMKM di tengah tantangan pandemi Covid-19.⁶³

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

Gambar 4. Surabaya Great Expo 2022



Sumber: Antaranews.com⁶⁴

Dalam realisasi kerja sama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kitakyushu, Seattle, Gaziantep, Liverpool, dan Xiamen untuk pengembangan UMKM lokal selama masa pandemi Covid-19, hasil yang dicapai belum memberikan dampak maksimal bagi pertumbuhan UMKM. Keberhasilan kerja sama *sister city* dalam pengembangan UMKM seharusnya dapat diukur melalui dampak nyata, seperti peningkatan jumlah pesanan, perluasan pemasaran, dan perluasan jangkauan produk UMKM di tingkat internasional. Namun, kenyataannya, produk-produk UMKM yang dikirimkan ke mitra *sister city* hanya sebatas diperkenalkan dan tidak diikuti dengan meningkatnya jumlah pesanan atau peningkatan permintaan. Hal ini terlihat dari tidak adanya kenaikan volume pendapatan atau manfaat signifikan lainnya yang dirasakan oleh UMKM Kota

⁶⁴ Antaranews. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi usai membuka 'Surabaya Great Expo 2022' di Grand City Surabaya, Rabu (24/8/2022). Diakses dalam <https://jatim.antaranews.com/berita/631549/eri-cahyadi-optimistis-produk-umkm-surabaya-tembus-pasar-internasional?&m=false> (5/3/2025, 21.42 WIB)

Surabaya setelah program kerja sama tersebut dilaksanakan. Dengan demikian, meskipun upaya promosi telah dilakukan, kerja sama ini belum mampu memberikan dampak ekonomi bagi pengembangan UMKM lokal di tengah pandemi.⁶⁵

2.4.2 Dampak Paradiplomasi Dalam Bidang Lingkungan

Pemerintah Kota Surabaya menjalin kerja sama *sister city* dengan Pemerintah Kota Kitakyushu untuk menangani permasalahan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah. Kota Surabaya menghadapi tantangan besar dalam mengelola sampah, di mana pada tahun 2017 tercatat rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan per hari mencapai 3.234 ton. Permasalahan ini membutuhkan solusi yang tepat dan berkelanjutan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dengan memanfaatkan kerja sama *sister city*, Pemerintah Kota Surabaya dapat belajar dari kota Kitakyushu sebagai kota yang pernah mengalami krisis sampah dan lingkungan pada tahun 1970, namun sekarang telah berhasil mengatasinya hingga menjadi salah satu kota terbersih di dunia. Dengan demikian, prioritas yang ditentukan dalam program *sister city* ini berfokus untuk mengadaptasi teknologi-teknologi yang diterapkan di kota Kitakyushu, yang aman dan efisien untuk pendistribusian, pemilahan, dan penghancuran sampah di kota Surabaya.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Zacky Pandana & Praja Nuryananda. 2024. *Kerjasama Sister City Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Kota Kitakyushu Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Tahun 2012-2023*. Global Focus. Vol. 4. No. 1. Hal. 22-43.

Salah satu program unggulan dari kerja sama *sister city* antara Kota Surabaya dan Kota Kitakyushu adalah *Green Sister City*, yang telah berjalan sejak tahun 2012. Program ini dirancang sebagai respons terhadap berbagai tantangan lingkungan, seperti urbanisasi, kenaikan permukaan air laut, dan dampak pemanasan global serta perubahan iklim. *Green Sister City* menjadi dasar pembangunan untuk mengatasi kerusakan lingkungan secara besar-besaran dan menciptakan kota yang lebih sehat dan berkelanjutan. Pada tahun 2018, kerja sama ini mulai menunjukkan dampak positif bagi Surabaya, di antaranya dengan diraihnya penghargaan “*Online Popular City*” dalam *International Award for Urban Innovation* serta nominasi sebagai kota metropolitan dengan inovasi penataan lingkungan terbaik. Selain itu, Surabaya juga berhasil meraih penghargaan “*Sustainable City and Human Settlements Award*” untuk kategori *Global Green City* yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁶⁷

Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Surabaya menjalankan program *Workshop* Pengelolaan Sampah Metode Takakura, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sampah secara mandiri dan ramah lingkungan. Metode Takakura, yang dikembangkan oleh Dr. Koji Takakura dari Jepang, merupakan teknik pengolahan limbah sampah dengan memanfaatkan proses *aerob*, yaitu proses yang menggunakan udara untuk mendorong pertumbuhan mikroorganisme selama pengomposan. Keunggulan metode ini adalah kemampuannya menghilangkan bau tidak sedap yang biasanya muncul selama proses penguraian sampah organik. Program ini tidak hanya membantu

⁶⁷ *Ibid.*

mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan.

Gambar 5. Kunjungan Dr. Koji Takakura ke kantor Pemerintah Kota Surabaya



Sumber Gambar: Instagram.com⁶⁸

Tujuan dari *workshop* ini adalah mengajarkan warga Surabaya bagaimana mengelola sampah di rumah menggunakan metode yang diadopsi dari Dr. Koji Takakura. Dampak dari implementasi metode Takakura tersebut menurunkan angka volume produksi sampah di Surabaya tetap stabil di angka 1.752 ton pada tahun 2021, 1.792 ton pada tahun 2022, dan 1.792 ton pada tahun 2023. Di mana sebelum *workshop* ini diadakan, angka volume produksi sampah harian Surabaya berada di

⁶⁸ Instagram. *Kunjungan Kerja Delegasi Pemerintah Kota Kitakyushu, Jepang*. Diakses dalam https://www.instagram.com/hukumdankerjasama.surabaya/p/C_Rtu1XvhIS/?img_index=1 (5/3/2025, 21.50 WIB)

angka 2.222 ton per hari pada tahun 2020. Perkembangan ini menunjukkan keberhasilan program *sister city* Surabaya dengan Kitakyushu dalam pengelolaan sampah yang sempat menjadi masalah serius di kota Surabaya. Meski begitu, angka volume produksi sampah ini masih tetap dipantau dan dievaluasi agar bisa tetap stabil atau bahkan menurun di tahun-tahun berikutnya.⁶⁹

Implementasi paradiplomasi di Kota Surabaya tidak dapat dipisahkan dari peran wali kota sebagai pemegang otoritas tertinggi di pemerintahan kota. Di masa kepemimpinan Eri Cahyadi, Pemerintah Kota Surabaya hanya melanjutkan kerja sama yang telah terjalin sejak periode-periode sebelumnya. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kerja sama yang terjalin memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Surabaya. Hanya saja, tidak ada inisiasi untuk menjalankan kerja sama baru pada periode ini. Tidak adanya inisiasi kerja sama baru pada periode ini dikarenakan kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi yang berfokus pada agenda kerja sama yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Surabaya. Di sisi lain, agenda paradiplomasi juga memerlukan anggaran yang tidak sedikit dan proses yang panjang. Sehingga paradiplomasi tidak menjadi program utama Pemerintah Kota Surabaya dalam periode ini. Pada bab berikutnya, fokus pembahasan akan mengkaji implementasi paradiplomasi Kota Surabaya menggunakan lima dimensi yang dikemukakan oleh Brian Hocking.

⁶⁹ Zacky Alifirano Pandana & Praja Firdaus. 2024. *Kerjasama Sister City Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Kota Kitakyushu Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Tahun 2012-2023*. Global Focus. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.